

**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
MEMBIAYAI PENGELUARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL
TAHUN 1985 - 2000**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

FITROH ATMI NURBANI

NIM : 98313083

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2003**

**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
MEMBIAYAI PENGELUARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL
TAHUN 1985-2000**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

FITROH ATMI NURBANI

NIM : 98313083

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2003**

**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI
PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN BANTUL TAHUN 1985 – 2000**

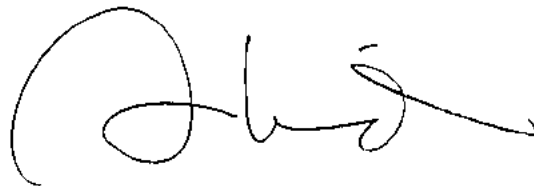
SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

FITROHATMI NURBANI
NIM : 98313083

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sidiq', with a large, stylized initial 'S' and a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. Sahabudin Sidiq, MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

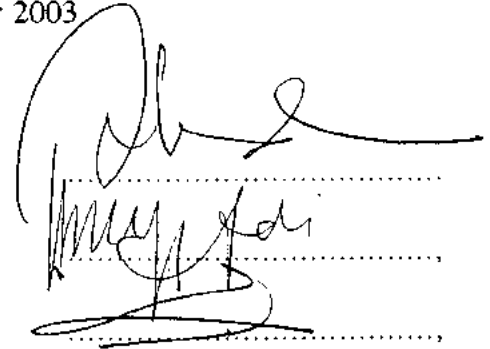
SKRIPSI BERJUDUL:

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI PENGELUARAN
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL TAHUN 1985 -
2000

Disusun Oleh: FITROH ATMI NURBANI
Nomor Mahasiswa: 98313083

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
pada tanggal 13 September 2003

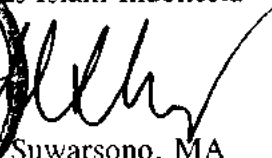
Pembimbing Skripsi : DRS. SAHABUDIN SIDIQ, MA
Penguji I : DRS. UNGGUL PRIYADI, M.SI
Penguji II : DRS. PRIYONGGO SUSENO, MA



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Suwarsono, MA

MOTTO

“ ... Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan karena itu, bila selesai suatu tugas mulailah dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau berharap.” (ASY-SYARH, ayat 5-8)

“... Jadilah orang yang bisa merasa, bukan jadi orang yang merasa bisa...”

“... don't walk so proud, don't talk so loud...”

PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karya kecil ini
untuk*

*❖ Ayah dan ibuku yang selalu
membimbingku dengan penuh kasih
sayang*

*❖ D'arif, D' Taufik, D' Lian yang
selalu memberiku dorongan dan
semangat*

*❖ Orang yang ku cinta didalam
hidupku, Mas Ary dan Astrid Putri*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program S-1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia. Adapun judul dalam pembahasan skripsi ini adalah "PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL Tahun (1985 – 2000)"

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati dan Insya Allah akan penulis perbaiki.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Sahabudin Sidiq, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing hingga skripsi ini selesai.
3. Direksi beserta staf karyawan DIPENDA, BPS, dan BAPPEDA yang telah memberi ijin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

4. teman-teman di MBS D.61A (Esti, Eka, Vera, Tuti, Ida, Dina, Inash, Amel, Susan, Dina kck) terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
5. Agung, thanks atas bantuannya.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih semuanya.

Semoga Allah SWT, memberi balasan yang setimpal atas segala dan semua bimbingan, dorongan, pengarahan dan doa. Amiin yaa rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, Agustus 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BERITA ACARA	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Metodologi Penelitian	9
1.6.1. Sifat Penelitian	9
1.6.2. Lokasi Penelitian	9
1.6.3. Sumber data	9
1.6.4. Tehnik Pengumpulan Data	10
1.6.5. Metode Analisis Data	10

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1. Telaah Pustaka	15
2.2. Perkembangan Keuangan Daerah	17
2.3. Sistem Keuangan Daerah	18

2.4. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	19
2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
2.6. Pendapatan Daerah	21
2.7. Pendapatan Asli Daerah	22
2.7.1. Pengertian PAD	22
2.7.2. Sumber-sumber PAD	23
2.8. Pengeluaran Daerah	25
2.8.1. Pengertian Pengeluaran	25
2.8.2. Pengertian Pengeluaran Daerah	26
2.8.3. Jenis Pengeluaran Daerah	26
2.8.4. Tujuan dan Manfaat Pengeluaran Daerah	26
2.8.5. Pengeluaran Pembangunan	27

BAB III : GAMBARAN UMUM

3.1. Keadaan Geografis dan Wilayah	32
3.2. Keadaan Penduduk	34
3.2.1. Penduduk Menurut Pekerjaan	35
3.3. Keadaan Perekonomian	35
3.3.1. Perubahan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	36
3.3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	37

BAB IV : ANALISA DATA

4.1. Elastisitas	41
4.1.1. Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah	41
4.1.2. Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Retribusi Daerah	43
4.1.3. Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Laba BUMD	44

4.1.4. Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Penerimaan Dinas-dinas	46
4.1.5. Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Penerimaan Lain-lain	47
4.2. Efektifitas	49
4.3. Analisa Trend Sederhana	50
4.4. Kontribusi PAD Terhadap Pengeluaran Pembangunan	53

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA xiii

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.	APBD Kabupaten DATI II Bantul Tahun Anggaran 2000/2001	3
Tabel. 1.2.	Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten DATI II Bantul Tahun 1985 - 2001	5
Tabel. 3.1.	Luas Wilayah, KK, Penduduk Akhir Tahun dan Rata-rata jiwa/km ² perkecamatan Kabupaten DATI II Bantul Tahun 2000	34
Tabel. 3.2.	Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Dirinci Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Bantul Tahun 2000	35
Tabel. 3.3.	PDRB Kabupaten DATI II Bantul Tahun 1995-2000	37
Tabel. 3.4.	APBD Kabupaten DATI II Bantul Tahun Anggaran 2000/2001	39
Tabel. 3.5.	APBD Kabupaten DATI II Bantul Tahun 2000/2001	40
Tabel. 4.1.	Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1986-2001	42
Tabel. 4.2.	Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1986-2001	44
Tabel. 4.3.	Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Laba BUMD Kabupaten Bantul Tahun 1986-2001	45
Tabel. 4.4.	Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Dinas-dinas Kabupaten Bantul Tahun 1986-2001	47
Tabel. 4.5.	Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Lain-lain Kabupaten Bantul Tahun 1986-2001	48
Tabel. 4.6.	Efektifitas Penerimaan PAD Kabupaten DATI II Bantul Tahun 1985- 2001	49
Tabel. 4.7.	Analisa Trend Sederhana Penerimaan PAD Kabupaten DATI II Bantul Tahun 1985-2001	50
Tabel. 4.8.	Analisa Trend Sederhana Pengeluaran Pembangunan Kabupaten DATI II Kabupaten Bantul Tahun 1985-2001	52

Tabel. 4.9. Kontribusi Penerimaan PAD Terhadap Pengeluaran Pembangunan Kabupaten DATI II Bantul Tahun 1985-2001	53
Tabel. 4.10. Kontribusi Penerimaan PAD Terhadap Pengeluaran Pembangunan Kabupaten DATI II Bantul Tahun 2002-2005	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan mencakup segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras, dan saling menunjang antara semua bidang. Pembangunan terutama ditunjukkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. (Lincoln Arsyad, 1988, hal.16)

Pembangunan merupakan masalah nasional yang harus menyeluruh dan merata kesegnap penjuru tanah air. Untuk itu pembangunan tidak hanya dilaksanakan dipusat pemerintahan saja, melainkan juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pemerintah desa. Namun untuk menjadi titik berat adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena mengingat betapa pentingnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut, seperti yang dinyatakan dalam TAP MPR NO.II/MPR/ 1993 tentang GBHN, yaitu:

“ Pembangunan daerah sebagai bagian Integral Pembangunan Nasional telah semakin mendorong dan menguatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta peran serta dan kesejahteraan rakyat”.

Daerah tingkat II adalah daerah otonom yang mempunyai hak untuk mengurus rumah tanganya sendiri, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan dari pembangunan maka titik berat otonomi diletakkan pada daerah tingkat II dengan mempertimbangkan bahwa daerah tingkat II yang lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat (kansil, 1985, hal. 117)

Namun untuk melaksanakan semua kewajiban yang dilimpahkan kepadanya, daerah memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, faktor keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena setiap kegiatan pasti memerlukan biaya dan hampir tidak ada yang tidak membutuhkan biaya. Dengan demikian besarnya dana yang dimiliki maka kegiatan yang dilaksanakan juga semakin banyak pula.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah dengan melihat posisi keuangannya. Posisi keuangan daerah dapat dilihat dalam APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dalam setiap tahun anggaran. Demikian pula dengan kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Dari tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan lebih besar daripada pengeluaran yang mana penerimaan itu sebagian besar berasal dari PAD.

Dana untuk membiayai pembangunan daerah yang pada garis besarnya berasal dari dua sumber yaitu penerimaan dari negara yang dalam RAPBD disebut pendapatan dari pemerintah daerah atau instansi yang lebih tinggi dan pendapatan dari daerah itu sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah artinya, suatu daerah haruslah memiliki sumber-sumber dalam dalam PAD.

Tabel 1.1
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TAHUN 2000/2001
(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENERIMAAN DAERAH	
1.1	<i>Bagian lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu</i>	4.344.621
1.2	<i>Bagian Pendapatan Asli Daerah</i>	7.074.418
1.2.1	Pos pajak daerah	1.522.121
1.2.2	Pos Retribusi daerah	4.456.880
1.2.3	Pos laba usaha daerah	644.234
1.2.4	Pos Penerimaan lain-lain	451.182
1.3	<i>Bagian hasil pajak /Non pajak</i>	8.069.030
1.3.1	Pos hasil pajak	7.973.999
1.3.2	Pos hasil non pajak	95.031
1.4	<i>Bagian sumbangan pusat dan bantuan</i>	74.970.884
1.4.1	Pos subsidi	55.171.355
1.4.2	Pos bantuan	19.799.528
1.5	<i>Bagian penerimaan pembangunan</i>	2.543.900
1.5.1	Pos pinjaman pemerintah daerah	2.543.900
	Total penerimaan	97.002.853
2.	PENGELUARAN DAERAH	
2.1	<i>Pengeluaran rutin</i>	65.021.442
2.1.1	Belanja Pegawai	55.990.398
2.1.2	Belanja Barang	4.045.459
2.1.3	Biaya pemeliharaan	480.607
2.1.4	Belanja perjalanan dinas	78.098
2.1.5	Belanja lain-lain	2.176.472
2.1.6	Angsuran pinjaman/Hutang dan bunga	651.160
2.1.7	Ganjaran subsidi	888.138
2.1.8	Pengeluaran lain-lain	290.412
2.1.9	Pengeluaran tak terduga	420.698
2.2	<i>Pengeluaran pembangunan</i>	26.745.497
2.2.1	Bidang ekonomi	18.924.670
2.2.2	Bidang sosial	3.794.677
2.2.3	Bidang umum	2.583.999
2.2.4	Subsidi pembangunan kepada daerah bawahan	1.442.151
	Total pengeluaran	91.766.939

Sumber : Dipenda kab. Bantul

Besar kecilnya hasil PAD paling tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar otonomi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sebagai mana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, dimana PAD sendiri merupakan murni daerah, yang terdiri dari :

- A. Pajak daerah
- B. Restribusi daerah
- C. Laba BUMD
- D. Penerimaan dinas-dinas
- E. Penerimaan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah kabupaten daerah tingkat II Bantul dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini terlihat pada tabel 1.2 dibawah ini. Ini berarti kemampuan kabupaten Bantul dalam membiayai pengeluaran pembangunan yang berasal dari pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

Tabel 1.2
REALISASI PENERIMAAN PAD KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL
TAHUN 1985-20001
(dalam ribuan rupiah)

TAHUN	Pajak daerah	Retribusi daerah	Laba BUMD	Penerimaan dinas-dinas	Penerimaan lain-lain	Total PAD
1985	44.593	241.221	8.986	57.439	38.336	390.575
1986	55.793	313.773	13.979	54.224	48.197	485.966
1987	68.532	392.478	19.167	59.196	52.840	592.213
1988	104.309	700.783	23.365	57.428	55.521	941.406
1989	135.056	756.714	26.000	68.261	116.384	1.102.415
1990	158.669	1.026.007	44.200	69.123	72.137	1.370.136
1991	178.901	1.437.263	59.075	68.574	135.149	1.878.962
1992	201.015	1.828.229	96.605	88.028	241.817	2.455.694
1993	217.969	1.783.348	108.678	82.071	338.322	2.530.380
1994	412.017	2.182.937	105.330	209.901	332.647	3.242.832
1995	844.359	2.305.757	270.412	237.894	894.884	4.553.306
1996	1.258.509	2.970.663	369.750	246.649	349.444	5.195.012
1997	1.375.677	3.567.097	436.392	278.576	471.819	6.130.081
1998	1.571.947	3.387.967	368.314	265.329	962.347	6.555.905
1999	1.839.649	4.910.778	584.786	-	676.593	8.011.806
2000	1.522.121	4.456.881	644.234	-	451.182	7.074.418
2001	2.674.756	8.467.347	974.168	-	1.956.853	14.073.124

Sumber :Dipenda Kabupaten Bantul

1.2 PERUMUSAN MASALAH

- a. Seberapa besar peranan pajak daerah, retribusi daerah, Laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, serta penerimaan lain-lain terhadap PAD yang merupakan salah satu sumber membiayai pengeluaran pembangunan.
- b. Apakah sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam penerimaan PAD.
- c. Apakah prospek penerimaan PAD pada tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat.

- d. Seberapa besar sumbangan (kontribusi) yang diberikan PAD untuk pengeluaran pembangunan.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, penerimaan dinas-dinas, serta penerimaan lain-lain terhadap PAD yang merupakan salah satu sumber membiayai pengeluaran pembangunan.
- b. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penerimaan PAD
- c. Untuk mengetahui prospek penerimaan PAD pada tahun-tahun yang akan datang.
- d. Untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap pengeluaran pembangunan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat digunakan :

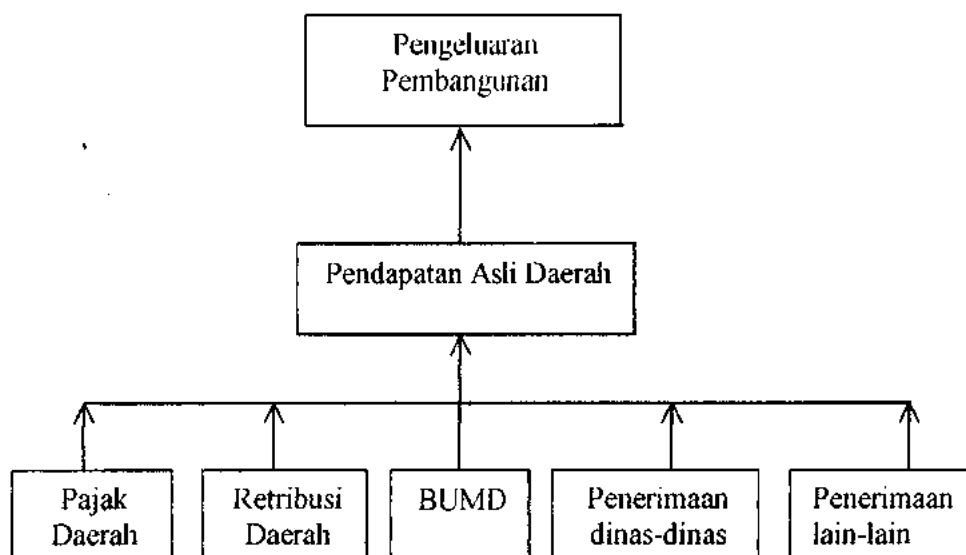
- a. Bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan dalam penentuan suatu kebijaksanaan, sehingga dapat meningkatkan PAD dimasa yang akan datang.
- b. Bagi Mahasiswa
 - i. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia usaha.

ii. Untuk membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktik-praktik yang ada di obyek penelitian.

c. Bagi Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan bagi pihak lain yang ingin mempejari peranan PAD dalam membiayai pengeluaran pembangunan.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar : Bagan Kerangka Pemikiran

Anggaran dan pendapatan belanja daerah adalah suatu perencanaan dalam bidang keuangan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan melihat APBD suatu daerah dapat dilihat kemampuan daerah tersebut untuk mengadakan pembangunan. Dalam APBD dapat dilihat

sumber-sumber keuangan daerah. Sumber-sumber tersebut adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan non pajak, Bantuan Pemerintah pusat, dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, penerimaan dinas-dinas, serta penerimaan lain-lainnya, yang sah menurut UU yang berlaku. Semua penerimaan-penerimaan tersebut adalah sumber penerimaan murni daerah dan digunakan masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Laba BUMD, Penerimaan dinas-dinas, serta penerimaan lain-lain yang meningkat terus dari tahun ke tahun akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi APBD. Untuk melihat besarnya pengaruh atau kontribusi yang telah diberikan oleh PAD melalui sumber-sumbernya, maka digunakan elastisitas yang diharapkan akan memberikan gambaran bahwa penerimaan PAD sangat besar pengaruhnya bagi APBD.

Peranan PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan di daerah perlu terus ditingkatkan, mengingat pemerintah pusat semakin menekankan agar pembangunan di daerah dapat dibiayai dengan dana dari daerah itu sendiri.

Untuk meningkatkan sumber-sumber PAD pemerintah perlu melihat apakah pajak daerah, retribusi daerah, Laba BUMD, Penerimaan dinas-dinas serta

Penerimaan lain-lain tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna atau tidak, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menentukan sumber-sumber PAD mana yang ditingkatkan dan mana yang masih perlu dibina sehingga nantinya diharapkan dengan meningkatnya penerimaan PAD akan meningkat pula APBD yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan maksud memperoleh data-data tentang peranan PAD di kabupaten Bantul.

1.6.2. Lokasi penelitian

Pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul

1.6.3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya

1.6.4. Tehnik pengumpulan data

a. Tehnik Observasi

Dilaksanakan pada dinas pendapatan daerah untuk memperoleh informasi tentang beberapa besar pajak daerah, bagi laba badan milik daerah, dan penerimaan lain dan usaha daerah yang sah terhadap PAD.

b. Tehnik wawancara

Tehnik wawancara yaitu tehnik yang menggunakan wawancara bebas terpimpin. Tehnik wawancara ini digunakan penulis untuk mengungkapkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti terutama data yang berkaitan dengan data primer untuk melengkapi data sekunder yang belum jelas.

c. Studi pustaka

Yaitu mempelajari literatur atau buku-buku perpustakaan, catatan kuliah serta bacaan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti

1.6.5. Metode analisa data

1.6.5.1. Analisa kualitatif

Dalam analisa kualitatif, data yang diperoleh ditempat penelitian akan dianalisa dalam bentuk uraian atau pengembaraan tentang gejala atau fenomena yang sedang diteliti.

1.6.5.2. Analisa kuantitatif

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data statistik, karena dalam penelitian ini penulis mengumpulkan,

mengolah, menyajikan, menganalisa dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka.

- a. Untuk melihat tingkat kepekaan atau hubungan antara PAD karena adanya perubahan pajak daerah, Laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, serta penerimaan lain-lain, maka digunakan analisa elastisitas :
(Boediono, 1982, hal. 31)

$$\begin{aligned}
 & \text{E. Pajak daerah} && \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan Pajak Daerah}} \\
 & \text{terhadap Penerimaan PAD} && \\
 & \text{E. Restribusi daerah} & = & \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan retribusi Daerah}} \\
 & \text{terhadap Penerimaan PAD} && \\
 & \text{E. BUMD daerah} & = & \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan BUMD}} \\
 & \text{terhadap Penerimaan PAD} && \\
 & \text{E. Penerimaan dinas-dinas} & = & \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan penerimaan dinas-dinas}} \\
 & \text{terhadap Penerimaan PAD} && \\
 & \text{E. penerimaan lain-lain} & = & \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan penerimaan lain-lain}} \\
 & \text{terhadap Penerimaan PAD} &&
 \end{aligned}$$

Jika koefisien elastisitas lebih besar dari satu ($E > 1$) berarti elastis, maka hal itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan PAD relatif peka terhadap pajak daerah, restribusi daerah, BUMD, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan lain-lain. ($E < 1$) berarti inelastis, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan PAD relatif kurang peka terhadap sumber-sumbernya. ($E = 1$) berarti unelastis, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan PAD

berubah dengan persentase yang sama dengan perubahan dari sumber-sumbernya.

- b. Penerimaan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pengeluaran pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu digunakan dua tolak ukur kebijaksanaan anggaran yaitu hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency). (Nick Devas.dkk, 1989, hal.144-146)

1. Hasil Guna

Yaitu pengukuran hubungan antara hasil penerimaan PAD dengan potensi hasil PAD. Dimana yang dimaksud dengan hasil penerimaan PAD adalah realita dari penerimaan PAD dan potensi hasil penerimaan PAD adalah target yang akan dicapai dari penerimaan PAD. Adapun formula efektivitas PAD yaitu :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realitas penerimaan PAD}}{\text{Potensi (target) penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tujuan. Dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target produksi baik dalam hal kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan. Jika prosentase rata-ratanya mendekati 100% atau 1, maka dikatakan bahwa penerimaan PAD sudah dapat dilakukan secara efektif.

2. Daya Guna

Yaitu mencakup bagaian dari hasil PAD yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan PAD. Adapun formula efesiensi PAD yaitu :

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya pemungutan PAD}}{\text{Realitas penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efisiensi mengukur biaya sumber daya yang diperlukan sehubungan dengan pencapaian tujuan, dalam hal ini adalah perbandingan antara biaya pemungutan PAD dengan realiatas penerimaan PAD. Akan lebih dikatakan efisien bila biaya untuk pemungutan PAD di tekan serendah mungkin terhadap realitas penerimaan PAD. Tetapi saat ini ada surat keputusan dari bupati Bantul NO. 437 TAHUN 2002 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Bantul pengganti NO. 2 TAHUN 1984 tentang pemberian uang perangsang kepada dinas pendapatan daerah dan instansi lain yang membantu / berkaitan dengan usaha pemasukan pendapatan asli daerah tingkat II Bantul sebagai berikut: menetapkan uang perangsang atau biaya pemungutan PAD sebesar 5 % dari realisasi penerimaan PAD.

- c. Prospek penerimaan PAD sebagai salah satu sumber pengeluaran pembangunan semakin baik untuk tahun-tahun mendatang digunakan analisis trend atau secular trend. Trend rata-rata perubahan (biasanya tiap tahun) dalam jangka panjang. Persamaan trend dengan metode least square adalah sebagai berikut: (Pangestu Subagyo, 1986, hal.32)

$$Y' = a + bX$$

Dimana

a = konstanta

b = Slope atau lereng garis trend

X = waktu(tahun)

Sedangkan untuk mencari nilai a dan b digunakan persamaan sebagai berikut :

$$\sum Y - n a + b \sum X \dots\dots\dots(1)$$

$$\sum XY = a \sum X + b \sum X^2 \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan diatas, dapat rumus sebagai beriku :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana :

Y= penerimaan PAD

n = jumlah data

Jika nilai trend menunjukkan kenaikan atau positif maka hipotesis yang menyatakan bahwa penerimaan PAD meningkat terbukti.

d. Analisis Kontribusi PAD terhadap pengeluaran pembangunan.

Formulasinya adalah : (Nick Devas.dkk, 1989, hal.200)

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realitas PAD}}{\text{Pengeluaran Pembangunan}} \times 100\%$$

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. TELAAH PUSTAKA

Penulis menjadikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka diantaranya :

2.1.1. Jaka Sriyana

Dari penelitian Jaka Sriyana tahun 1999 mengenai “ Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah”. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian itu antara lain :

Sistem hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia menunjukkan masih adanya sentralisasi yang cukup besar pada pemerintah pusat. Masalah hubungan keuangan pusat-daerah memang bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi sarat dengan muatan masalah ketatanegaraan, politik, sosial dan budaya. Seiring proses reformasi disegala bidang di Indonesia, sistem keuangan pusat-pusat daerah juga perlu ditingkatkan mengingat bahwa pembangunan daerah merupakan inti dari pembangunan nasional. Kebijakan ini akan lebih menjamin adanya keselarasan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kemampuan keuangan antar daerah dan partisipasi masyarakat masing-masing daerah. Dalam bahasa yang mudah dipahami adalah adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dengan tetap berpegang pada konsep negara kesatuan Indonesia.

Dengan adanya reformasi perpajakan yang ditandai dengan lahirnya beberapa UU tentang perpajakan, memberikan dampak penghapusan beberapa komponen yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan penerimaan

daerah. Dengan demikian diharapkan ada peningkatan kemandirian pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dampak lain dari adanya reformasi perpajakan ini adalah peningkatan efisiensi ekonomi nasional sehingga akan merangsang investor untuk menanamkan usahanya dimasing-masing daerah. Dalam jangka panjang peningkatan investasi akan berdampak pada peningkatan volume kegiatan ekonomi, sehingga secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan daerah, melalui pajak dan retribusi. Namun demikian agar dampak reformasi perpajakan terhadap masing-masing daerah bisa maksimal, perlu adanya strategi khusus bagi masing-masing daerah dalam melaksanakan pembangunan.

2.1.2. Irianti J. Kusumawati

Penelitian oleh Irianti J. Kusumawati tahun 1997 dengan menggunakan data survey “ Peranan PAD Dalam Membiayai Pengeluaran Rutin Daerah Tingkat II Di Kabupaten Bantul Tahun 1983-1997 “. Kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan kasus teori elastisitas untuk mengetahui derajat kepekaan dan tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat bahwa elastisitas pertumbuhan PAD terhadap sumber-sumbernya tidak semua elastis, terutama terhadap laba BUMD dan penerimaan dinas-dinas adalah inelastis ($E < 1$).
- Berdasarkan analisa efisiensi realisasi penerimaan PAD terhadap biaya pemungutannya dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD daerah tingkat II kabupaten Bantul sudah efisien. Berdasarkan efektifitas realisasi penerimaan PAD pertahun cukup efektif (mendekati 1).

- Berdasarkan kontribusi PAD terhadap pengeluaran rutin, penerimaan PAD cenderung meningkat dan dari analisa trend sederhana, prospek penerimaan PAD untuk tahun yang akan datang juga meningkat.

2.2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Perkembangan keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda, yakni pada abad ke-15 dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara dekonsentrasi. Waktu itu sistem keuangan daerah ditentukan langsung oleh Gubernur jenderal dari pusat.

Beberapa abad kemudian, pada tahun 1903 dikeluarkan *desentralisasi wet*, dimana undang-undang ini menganut prinsip desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah-daerah otonomi yang berada dibawah kekuasaan Belanda tersebut disebut *gewest* (sama dengan propinsi sekarang), *standsgemeente* (sama dengan kodya), *regent schap* (sama dengan kabupaten). (B.J. Kristiadi, 1985, hal. 35)

Berdasarkan *desentralisatie wet* itu, daerah diberikan tunjangan tetap dari pusat yang merupakan sejumlah dana yang dipisahkan dari budget pusat bagi usaha-usaha membiayai daerah-daerah. Sejumlah “tunjangan tetap” diperhitungkan dari jumlah rata-rata pengeluaran daerah selama 5 tahun terakhir. Untuk menutupi biaya yang terus bertambah, maka didalam perkembangannya kemudian, daerah-daerah mengadakan pungutan pajak, bahkan beberapa daerah berusaha untuk mengadakan pinjaman.

2.3. SISTEM KEUANGAN DAERAH

Sistem keuangan dalam Undang-undang No.1 tahun 1945 disebutkan mengenai *sluit post* (sistem menutupi kekurangan), tetapi dalam Undang-undang No.22 tahun 1948, sistem *sluit post* dihapuskan. Karena sistem ini menyebabkan ketergantungan keuangan daerah pada keuangan pemerintah pusat. Disamping itu dengan sistem *sluit post*, daerah kurang hati-hati dalam menjalankan politik keuangannya, sehingga jika terjadi kekurangan lalu meminta begitu saja pada pemerintah pusat. Oleh karena itu sistem *sluit post* diganti dengan sistem bagi hasil pajak negara. Dengan demikian, diharapkan daerah akan lebih hati-hati dalam menjalankan politik keuangannya. Didalam perkembangannya, sistem *sluit post* ini masih tetap dipakai.

Untuk lebih jelasnya, ada baiknya diuraikan tentang sistem penyerahan bagi hasil dalam undang-undang No.22 tahun 1948. Sistem penyerahan bagi hasil dalam undang-undang itu, mengatur mengenai sumber-sumber keuangan yang membolehkan daerah untuk memungutnya. Undang-undang ini mengenai keuangan daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari:

- a. Pajak daerah dan Retribusi
- b. Pendapatan hasil perusahaan daerah
- c. Pajak negara yang diserahkan pada daerah
- d. Dan lain-lain (seperti pinjaman, subsidi, penjualan atau penyewaan barang-barang milik negara).

Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi dan pengurusan keuangan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian, diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBD-nya

sendiri.(Azhari A. Samudra, 1995, hal.39-40). Sampai tahun 1956, sistem penyerahan bagi hasil pajak negara seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No.22 tahun 1948 tetap dijadikan sebagai dasar pengaturan keuangan daerah.

2.4. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah maka suatu daerah membutuhkan biaya, dan biaya itu harus dipikul oleh masing-masing daerah yang menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan. Jadi mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri adalah atas biaya sendiri pula. Untuk keperluan tersebut suatu daerah harus mempunyai kas (keuangan) tersendiri, yang terpisah dengan keuangan pemerintah pusat, untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk menyelenggarakan tugas perbantuan. Semakin luas dan rumitnya urusan yang diselenggarakan, akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu prinsip-prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang No. 5 tahun 1974, Perpajakan Umum, menghendaki kesanggupan keuangan yang sebesar-besarnya pula bagi tiap-tiap daerah.

Tentu saja untuk keperluan tersebut, tiap daerah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan tertentu untuk mengisi kasnya. Begitu pula bagi pemerintah pusat keperluan pemerintah, negara harus mempunyai keuangan tersendiri beserta sumber-sumbernya. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah khususnya mengenai pembagian sumber-sumber keuangan, masing-masing haruslah diatur sebaik-baiknya agar dapat terpelihara keseimbangan keuangan yang harmonis dan tepat.

Undang-undang No.32 tahun 1957 memuat tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun maksud undang-undang perimbangan keuangan ini adalah:

- a. Memberikan ketentuan sekedar menjamin keuangan daerah;
- b. Mendorong ke arah penychatan rumah tangga daerah;
- c. Mendorong daerah untuk mengintensivir sumber-sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumber-sumber baru;
- d. Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah; supaya daerah lebih leluasa dalam menjalankan kebijaksanaan keuangan untuk menjalankan tugasnya. (J.Wajong, 1960, hal.50-51)

2.5. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran dapat diartikan sebagai neraca keuangan untuk suatu jangka waktu tertentu yang menyangkut baik neraca penerimaan maupun neraca pengeluaran dimasa yang akan datang. Sedangkan penyusunan anggaran negara termasuk dalam fungsi penerimaan dari administrasi negara. Fungsi administrasi negara disamping perencanaan adalah pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan dalam jangka waktu tertentu yang menyangkut baik neraca penerimaan maupun neraca pengeluaran. (Dr.M.Suparmoko,MA, 1987, hal.59). Dalam hal pedoman pembentukan APBD, pemerintah daerah masih tetap memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. Balance budget, yaitu prinsip yang mengusahakan agar terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
- b. Efektivitas dan efisiensi, yaitu agar anggaran pemerintah menjadi suatu usaha kearah tercapainya peningkatan sumber penghasilan secara optimal dengan

berpegang teguh pada prinsip terpeliharanya daya mampu masyarakat serta keadilan sosial.

- c. Prioritas, yaitu agar setiap pengeluaran berdasarkan skala prioritasnya sehingga dengan demikian penerimaan daerah dapat menggambarkan kearah usaha pengendalian, khususnya pada sektor pengeluaran yang efektif dan efisien.

Tujuan dari APBD, sebagaimana dengan anggaran negara mempunyai arti:

- a. Suatu dasar kebijaksanaan menjalankan keuangan yang akan dilakukan oleh daerah untuk suatu masa (satu tahunan), dengan memakai periode waktu tahun anggaran.
- b. Suatu pemberian kuasa dari DPRD kepada badan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif dengan batas tertentu untuk melakukan pengeluaran sebagai akibat menjalankan pemerintahan.
- c. Batas-batas mana badan pemerintah daerah dapat bergerak dan bertindak.
- d. Suatu badan pengawasan yang dilakukan oleh penguasa atasan terhadap daerah bawahannya sehingga dapat berjalan dengan baik.

2.6. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah suatu sumber pendapatan yang meliputi tidak saja PAD, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam relisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau yang lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah, penyerahan modal pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat. (Azhari A. Samudra, op.cip, hal.50-51)

Menurut pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1974, sumber pendapatan daerah adalah berasal dari: (Riwu Kaho, 1982, hal.123)

- A. PAD yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil Retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- B. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dalam perundang-undangan

2.7. PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.7.1. Pengertian PAD

PAD terdiri dari tiga kata yaitu Pendapatan, Asli dan Daerah. Pendapatan merupakan jumlah yang diterima dalam waktu tertentu berupa uang atau barang dan jasa-jasa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kata asli dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari daerah itu sendiri yang dapat digali dari sumber-

sumber yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu PAD dapat diartikan sebagai imbalan yang diperoleh akibat faktor-faktor produksi yang berasal dari daerah itu sendiri atau yang digali dari potensi daerah itu ditukarkan dipasar.

2.7.2. Sumber-sumber PAD

A. Pajak Daerah

Untuk dapat mewujudkan dan membiayai pembangunan daerah maka salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah adalah mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak. Pengertian pajak daerah banyak dikemukakan oleh para ahli dibidangnya masing-masing meskipun tidak sama tetapi maksud dan tujuannya sama.

Menurut K.J. Davey pengertian pajak daerah itu diartikan dalam empat definisi yaitu:

- a. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang pungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak daerah yaitu pajak yang ditetapkan dan atau dipunyai oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah, dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II antara lain: pajak pertunjukan/ tontonan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak anjing, pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan dan sebagainya.

B. Retribusi daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. (Soetrisno PH, 1981, hal.202).

Tiap-tiap daerah dalam menentukan jenis-jenis retribusi yang akan ditarik didaerahnya berbeda-beda, karenamasing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi yang dimiliki daerah merupakan faktor alami, seperti letak yang strategis, wilayah yang luas, penduduk yang banyak serta kekayaan alam yang banyak. Namun untuk daerah tingkat II, penerimaan retribusi yang besar adalah retribusi pasar, rumah sakit, dan klinik, juga jembatan timbang dan terminal bis, yaitu memberikan masukan lebih dari setengah penerimaan total dari retribusi. (Nick Devas (ed), 1989, hal.92)

C. Laba BUMD .

BUMD adalah badan usaha yang terbentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah guna menambah penghasilan yang mempunyai dua fungsi pokok yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang harus mampu memberikan rangsangan atau stimulus bagi perkembangan daerah dan juga sebagai penghasil pendapatan daerah.

D. Penerimaan dari Dinas Daerah

Penerimaan dinas-dinas adalah penerimaan dari dinas-dinas daerah yang tidak termasuk sebagai penerimaan yang berasal dari dinas pendapatan daerah. Meskipun fungsi pokok dinas daerah adalah melaksanakan sebagian urusan

pemerintah yang telah dilimpahkan kepada masyarakat, ada kalanya dinas-dinas daerah menghasilkan pendapatan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.

E. Penerimaan Lain-lain

Penerimaan lain-lain adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang tidak termasuk sebagai penerimaan pajak daerah, bagi laba pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1974, termasuk penerimaan lain-lain adalah penerimaan dari sewa dinas milik daerah dan hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah. (Departemen Keuangan RI, hal.356)

2.8. PENGELUARAN

2.8.1. Pengertian Pengeluaran

Pengeluaran konsumsi perorangan atau rumah tangga meliputi pengeluaran untuk barang-barang konsumsi tahan lama yang tidak habis sekali pakai, misalnya sepeda motor, televisi, rumah, dan lain-lain, serta pengeluaran untuk konsumsi barang sekali pakai habis, misalnya makanan, rokok, pasta gigi, dan lain-lain atau yang berupa jasa sekali pakai yaitu konsultasi dokter kesehatan, tukang gunting rambut, dan lain-lain.

Pengeluaran pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah tingkat I dan kodya atau kabupaten tingkat II untuk membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan serta pembelian secara langsung sumber-sumber terutama SDM tetapi tidak termasuk pembayaran transfer oleh pemerintah karena pengeluaran ini tidak mencerminkan atau berhubungan dengan kegiatan produksi sedang berjalan tetapi hanya merupakan transfer pemerintah kepada perorangan atau rumah tangga tertentu. (Faried Wijaya, 1989, hal.22-23)

2.8.2. Pengertian Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah daerah. Perlu ditekankan disini bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintah daerah tidak hanya digunakan uang melainkan meliputi pula seluruh sumber daya ekonomi, termasuk penggunaan sumberdaya manusia, alam, peralatan modal serta barang-barang dan jasa lainnya.

2.8.3. Jenis Pengeluaran Daerah

- A. Pengeluaran atau belanja rutin yang terdiri dari:
 - a. Belanja barang
 - b. Belanja pegawai
 - c. Belanja pemeliharaan
 - d. Belanja lain-lain
- B. Pengeluaran atau belanja pembangunan, yang terdiri dari.
 - a. Pengeluaran non proyek
 - b. Bantuan proyek untuk kegiatan-kegiatan pembangunan

2.8.4. Tujuan dan Manfaat Pengeluaran Daerah

Tujuan pengeluaran daerah adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan didaerah, serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dari bantuan pemerintah pusat. Manfaat dari pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

2.8.5. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan baik bangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, pembelian kendaraan dan lain-lain maupun pembangunan non fisik-spiritual termasuk penataran-penataran, training dan lain-lain.

a. Pengeluaran non proyek

Pengeluaran non proyek ini berupa pengeluaran untuk pembelian peralatan tetap seperti mesin ketik, kendaraan, pembangunan gedung, pembuatan jalan, dan jembatan. Pembiayaan rupiah ini mempunyai kaitan erat dan bahkan identik dengan apa yang dinamakan pengeluaran modal.

b. Bantuan proyek untuk kegiatan-kegiatan pembangunan

Pengeluaran pembangunan pada akhirnya merupakan pengeluaran yang berbentuk proyek. Dari segi ini jenis proyek dapat dibedakan antara proyek makro dan proyek mikro. Proyek makro adalah proyek yang mempunyai nilai ekonomis bagi sebagian anggota masyarakat atau malahan kadang-kadang bagi seluruh masyarakat, sedangkan proyek mikro terutama memberi manfaat hanya bagi proyek yang bersangkutan. Proyek yang dapat membantu kelancaran dalam pembangunan dibedakan menjadi empat: (Drs. Soetrisno PH, Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara, BPFE, 1982, hal 346-347)

a. Proyek pertahanan, keamanan, ketertiban.

Miasalnya proyek pembuatan lapangan udara militer, proyek pendirian gedung pengadilan, sistem jaringan radio dan komunikasi.

b. Proyek ekonomi dan sosial.

Proyek yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya proyek bendungan, proyek jalan, jembatan, dan infra struktur lainnya, pembukaan daerah transmigrasi.

c. Proyek perbankan dan keuangan.

Proyek yang berfungsi perbankan ini misalnya proyek gerakan peningkatan tabungan, proyek pembentukan pasar uang, dan pasar modal serta proyek pembinaan lembaga asuransi.

d. Proyek pendidikan.

Proyek ini berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa termasuk proyek penerangan umum, perpustakaan umum, proyek pembuatan gedung-gedung sekolah.

- Konsep Elastisitas

Elastisitas digunakan untuk mengetahui besarnya derajat kepekaan dan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. variabel dependen dan variabel independen masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, penerimaan lain-lain. Untuk melihat elastisitasnya digunakan rumus:

E. Pajak daerah terhadap

$$\text{penerimaan PAD} = \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan Pajak Daerah}}$$

E. Retribusi daerah terhadap

$$\text{penerimaan PAD} = \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan Retribusi Daerah}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{E. Laba BUMD terhadap penerimaan PAD} &= \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan Laba BUMD}} \\
 \text{E Penerimaan Dinas-dinas terhadap penerimaan PAD} &= \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan Penerimaan Dinas - dinas}} \\
 \text{E. Penerimaan Lain-lain terhadap penerimaan PAD} &= \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan PAD}}{\% \text{ Perubahan Penerimaan Lain - lain}}
 \end{aligned}$$

- Konsep Efisiensi

Efisiensi dalam penerimaan PAD digunakan untuk menentukan bagi hasil dari penerimaan PAD dengan mendasarkan pada tingkat realisasinya. Adapun tingkat realisasi tersebut digunakan untuk menutup biaya pemungutan PAD. Oleh karena itu untuk melihat efisiensi dari penerimaan PAD dapat digunakan rumus :

$$\frac{\text{Biaya pemungutan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- Konsep Efektifitas

Efektiditas penerimaan PAD dihitung dengan membandingkan antara penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD. Adapun untuk mengukur efektifitas tersebut digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- Analisa Trend Sederhana

Analisa trend sederhana digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan penerimaan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan catatan bahwa variabel-variabel dependen penerimaan PAD dan pengeluaran pembangunan bersifat tetap. Analisa trend sederhana menggunakan rumus :

$$Y' = a + bx$$

Dimana : Y =Penerimaan PAD

a = Konstanta

b = slope

x = waktu

- Kontribusi PAD terhadap pengeluaran pembangunan

Untuk membuktikan bahwa penerimaan PAD memberikan sumbangan terhadap pengeluaran pembangunan. Kontribusi PAD terhadap pengeluaran pembangunan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Pengeluaran pembangunan}} \times 100\%$$

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. KEADAAN GEOGRAFIS DAN WILAYAH

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang dipilih untuk penelitian ini termasuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan ketinggian tempat, maka tinggi pusat pemerintahan Kabupaten Bantul adalah 0 – 500 m diatas permukaan laut dengan bentuk wilayah 40 % dataran rendah dan lebih dari separuhnya 60 % berupa daerah perbukitan yang kurang subur.

Luas wilayah kabupaten Bantul adalah 506,85 Km², atau 15,90 % dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan letak geografisnya 110^o 18' – 110^o 24' Bujur Timur dan 7^o 46' – 8^o 00' Lintang Selatan. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul terdapat 6 sungai yang mengalir, 3 diantaranya sungai besar, aliran relatif konstans, namun terjadi fluktuasi musiman pada volume/ debitnya, disamping potensial juga rawan banjir.

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul terdiri dari 3 wilayah Tuti (Pembantu Bupati), 17 kecamatan, dan 75 desa dengan keadaan alam yang secara garis besar terdiri dari :

- Bagian barat adalah daerah landai yang kering serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 8.986 Km² (17,7 % dari seluruh wilayah).
- Bagian tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian.

- Bagian timur merupakan daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat seluas 20.605 Km² (40,65 % dari seluruh wilayah).
- Bagian selatan sebenarnya merupakan bagian tengah dengan keadaan alamnya berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang dipantai selatan dari kecamatan Srandakan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kotamadya Yogyakarta dan Kab. Dati II Sleman.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Dati II Gunung Kidul.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Dati II Kulonprogo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Tata guna lahan Kab. Dati II Bantul adalah sebagai berikut :

- Lahan untuk sawah adalah seluas 6.501 Ha atau 12,92 % dari luas lahan seluruhnya.
- Lahan untuk tegalan adalah seluas 6.501 Ha atau 12,92 % dari luas lahan seluruhnya.
- Lahan untuk tanah hutan 0,936 Ha atau 1,85 % dari luas lahan seluruhnya.
- Lahan tanah lain-lain adalah seluas 6.580 Ha atau 12,96 % dari luas lahan seluruhnya.

3.2. KEADAAN PENDUDUK

Penduduk Daerah Tingkat II Bantul dari tahun 1985 – 2000 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1985 penduduk berjumlah 671.455 orang dengan kepadatan 1.328 per Km² dan pada tahun 2000 jumlah penduduk mengalami kenaikan menjadi 776.624 orang dengan kepadatan 1.532 Km².

Tabel 3.1

Luas Wilayah, Kepala Keluarga, Penduduk Akhir Tahun dan Rata-rata Jiwa per Km² per Kecamatan Tahun 2000

KECAMATAN	LUAS (Km ²)	KK	PENDUDUK	Rata-rata Jiwa Per	
				Km ²	KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Srandakan	18,32	6.703	28.954	1.580	4,32
2. Sanden	23,16	8.228	33.765	1.458	4,10
3. Kretek	26,77	7.388	30.412	1.136	4,12
4. Pundong	23,68	7.597	32.715	1.382	4,31
5. Bambanglipuro	22,70	9.412	42.021	1.851	4,46
6. Pandak	24,30	11.895	47.475	1.954	3,99
7. Bantul	21,95	13.516	56.581	2.578	4,19
8. Jetis	24,47	13.110	48.328	1.975	3,69
9. Imogiri	54,49	12.621	55.589	1.020	4,40
10. Dlingo	55,87	9.801	35.795	641	3,65
11. Pleret	22,97	9.127	33.507	1.459	3,67
12. Piyungan	32,54	9.433	37.234	1.144	3,95
13. Banguntapan	28,48	16.023	73.937	2.596	4,61
14. Sewon	27,16	21.814	73.783	2.717	3,38
15. Kasihan	32,38	15.167	75.256	2.324	4,96
16. Pajangan	33,25	6.708	29.424	885	4,39
17. Sedayu	34,36	9.224	41.848	1.218	4,54
JUMLAH	506,85	187.767	776.624	1.532	4,14

Sumber : BPS Kab. Bantul

3.2.1. Penduduk Menurut Pekerjaan

penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang merupakan angkatan kerja dapat dibedakan menurut lapangan pekerjaan utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Dirinci Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Tahun 2000

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Persen
1.	Pertanian	32,71
2.	Pertambangan dan galian	0,61
3.	Industri	19,96
4.	Listrik, gas, dan air	0,13
5.	Konstruksi	9,44
6.	Perdagangan	18,94
7.	Komunikasi	4,79
8.	Keuangan	0,74
9.	Jasa	12,68

Sumber : BPS Kodya Yogyakarta.

Dari tabel diatas diketahui bahwa penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagian besar bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian yang jumlahnya mencapai 32,71 %. Dimana wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagian besar merupakan daerah agraris.

3.3. KEADAAN PEREKONOMIAN

Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul terus dipacu dan dikembangkan melalui pembangunan disegala bidang sehingga diharapkan

mampu meningkatkan pendapatan perkapita, mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian yang mendasar dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Perekonomian terbentuk diberbagai kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan bidang yang satu berkaitan dengan bidang-bidang yang lainnya, saling mendorong dan saling melengkapi. Keberhasilan dibidang ekonomi akan mampu mendorong perkembangan dan kemajuan di bidang-bidang yang lain.

Kegiatan pembangunan diberbagai bidang akan ditingkatkan dan disempurnakan dengan mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja yang mengarah pada pembagian pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan harus diprioritaskan pada bidang-bidang pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan segi pemerataan produksi dan stabilitas daerah

3.3.1. Perubahan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi didalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. PDRB setiap tahun menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi.

Perubahan dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat selengkapnya pada tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantul Tahun 1995- 2000
 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga konstan '93	Pertumbuhan (%)
1995	9.629.11	812.373	7,24
1996	1.089.573	866.488	6,57
1997	1.223.582	893.254	3,09
1998	1.698.131	808.361	-9,35
1999	2.000.689	819.324	1,36
2000	2.237.519	839.871	2,51

Sumber : BPS Kab. Bantul

Perhitungan PDRB dapat berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi pada periode tertentu (1 tahun) dan nilainya dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan. PDRB berdasarkan harga konstan menggambarkan perubahan volume produksi dimana perubahan harga yang terpengaruh inflasi dihilangkan dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB berdasarkan harga konstan dapat digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

3.3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

A. Penerimaan Daerah

Guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber dana. Masalah keuangan daerah pada hakekatnya sama dengan masalah pokok keuangan ditingkat pemerintah pusat, yaitu bagaimana pemerintah daerah mencari sumber-sumber dana dan kemudian

menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan.

Penerimaan daerah tingkat II Bantul dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Hasil bagi pajak dan non pajak
- c. Sumbangan atau bantuan pemerintah pusat
- d. Pinjaman pembangunan

Kabupaten daerah tingkat II Bantul pada tahun 2000 pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 7.074.418 atau sebesar 7,29 persen. Sumbangan PAD tersebut diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya mengenai penerimaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.4

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan penyusunan PAD dan merupakan sumber keuangan daerah disamping retribusi. Pajak tersebut merupakan pajak pusat atau negara yang diserahkan pada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dalam mengupayakan dan meningkatkan penerimaan daerah atau PAD, sektor pajaklah yang terus diupayakan dan dikembangkan agar dimasa yang akan datang bisa diandalkan dan mampu sebagai tumpuan. Untuk itu pemerintah terus melakukan berbagai langkah dan kebijaksanaan penyempurnaan sistem perpajakan dengan harapan akan mampu meningkatkan kepercayaan dan

kesadaran masyarakat membayar pajak sehingga kemandirian dalam pembangunan dapat dilakukan secara nyata.

Tabel 3.4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantul Tahun Anggaran 2000/2001
 (dalam ribuan rupiah)

No	Penerimaan Daerah	jumlah	persen
1	Anggaran tahun lalu	4.344.621	4,48
2	Pendapatan Asli Daerah	7.074.418	7,29
	a. Pajak daerah	1.522.121	
	b. Retribusi	4.456.880	
	c. Laba usaha daerah	644.234	
	d. Penerimaan lain-lain	451.182	
3	Hasil pajak/non pajak	8.069.030	8,32
	a. hasil pajak	7.973.999	
	b. hasil non pajak	95.031	
4	Sumbangan pusat dan Bantuan	74.970.884	77,29
	a. sumbangan	55.171.355	
	b. bantuan	19.799.528	
5	Pinjaman pembangunan	2.543.900	2,63
	a. pinjaman pemerintah daerah	2.543.900	
	Total	97.002.853	100

Sumber : Dipenda Kabupaten Bantul

B. Pengeluaran Daerah

Kegiatan pembangunan didaerah terdiri dari kegiatan sektoral yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dibiayai APBN, kegiatan regional yang dibiayai oleh APBD dan kegiatan perbantuan yang dilaksanakan pemerintah daerah yang dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat. Tugas-tugas perbantuan dibiayai dari macam-macam subsidi pembangunan daerah seperti inpres, dan lain-lain. Pengeluaran daerah tercermin dalam APBD yaitu pengeluaran yang dibiayai oleh sumber PAD, subsidi daerah otonomi (SDO), dan subsidi pemerintah pusat untuk pembangunan.

Pengeluaran rutin daerah adalah pengeluaran untuk menunjang penyelenggaraan berbagai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terus berulang setiap waktu. Pengeluaran ruti berdasarkan tahun anggaran 2000/2001 sebesar Rp. 65.021.442 atau 70,86 persen dari total pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran rutin tersebut meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.

Pengeluaran pembangunan daerah berdasarkan tahun anggaran 2000/2001 sebesar Rp. 26.745.497 atau 29,14 persen dari total pengeluaran daerah dan terbagi dalam beberapa sektor yaitu sekteor ekonomi, politik, sosial. Pengeluaran daerah kabupaten daerah tingkat II Bantul selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3.5

Tabel 3.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Tahun anggaran 2000/200
(dalam ribuan rupiah)

No	Pengeluaran Daerah	Jumlah	persen
1	Pengeluaran Rutin	65.021.442	70,86
	a. Belanja Pegawai	55.990.398	
	b. Belanja Barang	4.045.459	
	c. Biaya pemeliharaan	480.607	
	d. Belanja perjalanan dinas	78.098	
	e. Belanja Lain-lain	2.176.472	
	f. Angsuran pinjaman	651.160	
	g. Ganjaran subsidi	888.138	
	h. Pengeluaran lain-lain	290.412	
	i. Pengeluaran tak terduga	420.698	
2	Pengeluaran Pembangunan	26.745.497	29,14
	a. Bidang Ekonomi	18.924.670	
	b. Bidang Sosial	3.794.677	
	c. Bidang Umum	2.583.999	
	d. Subsidi pembangunan kepada daerah bawahan	1.442.151	
	Total	91.766.939	100

Sumber : Dipenda kabupaten Bantul

BAB IV

ANALISA DATA

4.1 ELASTISITAS

Elastisitas digunakan untuk mengetahui besarnya derajat kepekaan dan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Variabel dependen dan independen masing-masing adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Penerimaan Dinas-dinas dan Penerimaan Lain-lain.

4.1.1 Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah

Untuk menguji apakah pertumbuhan PAD mempunyai sifat elastis terhadap pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bantul, maka dilakukan analisis melalui perhitungan elastisitas. Perhitungan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 1986 – 2001 dapat dilihat pada tabel 4.1

Pada tabel 4.1 diketahui bahwa pada tahun 1986, tingkat elastisitasnya adalah inelastis karena kurang dari satu yaitu 0,98. Berarti apabila pajak daerah mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,98 dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 1987, tingkat elastisitasnya juga sama yaitu inelastis sebesar 0,96. Sedangkan pada tahun 1988, tingkat elastisitasnya berubah menjadi elastis yaitu sebesar 1,10. Ini berarti apabila pajak daerah mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 1,10 dengan faktor-faktor

lain dianggap tetap. Tetapi pada tahun 1989 tingkat elastisitasnya berubah menjadi inelastis lagi sebesar 0,61. Tahun 1990, 1991, 1992, tingkat elastisitasnya kembali menjadi elastis sebesar 1,35; 2,61; 2,29. Pada tahun 1993, 1994, 1995, 1996 menjadi inelastis begitu juga tahun 1998 dan 2000. Tahun 1997, 1999, 2001, tingkat elastisitasnya elastis. Jika tingkat elastisitasnya dirata-ratakan maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat elastisitasnya adalah elastis karena lebih besar dari 1, yaitu 1,06.

Tabel 4.1
Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Pajak Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 1986 – 2001

Tahun	% Perubahan Penerimaan PAD	% Perubahan Pajak Daerah	Elastisitas
1986	21,8	22,3	0,98
1987	19,7	20,5	0,96
1988	45,5	41,4	1,10
1989	15,8	25,7	0,61
1990	21,7	16,1	1,35
1991	31,3	12,0	2,61
1992	26,6	11,6	2,29
1993	3	8,1	0,37
1994	24,7	61,6	0,40
1995	33,6	68,8	0,49
1996	13,2	39,4	0,33
1997	16,5	8,9	1,86
1998	6,7	13,3	0,50
1999	20	15,7	1,27
2000	-12,4	-18,9	0,66
2001	66,2	54,9	1,21
Elastisitas Rata-rata			1,06

4.1.2 Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Retribusi Daerah

Dari hasil perhitungan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Bantul tahun 1986 – 2001. Pada tabel 4.2 diketahui pada tahun 1986, tingkat elastisitasnya inelastis sebesar 0,83. Ini berarti apabila retribusi daerah mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,83 dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Begitu juga pada tahun 1987 dan 1988 tingkat elastisitasnya inelastis. Pada tahun 1989, tingkat elastisitasnya berubah menjadi elastis sebesar 2,05. Ini berarti apabila retribusi daerah mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 2,05 dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Tetapi pada tahun 1990 dan 1991, tingkat elastisitasnya kembali menjadi inelastis. Hal ini terjadi juga pada tahun 1993, 1996, 1997, 1998 dan 1999 dengan tingkat elastisitasnya sebesar 0,72; 0,94; -1,20; 0,52; 0,91; -1,30; 0,54. Pada tahun 1992, 1994, 1995, 2000, 2001, tingkat elastisitasnya elastis. Tingkat elastisitas tertinggi terjadi pada tahun 1995 yaitu sebesar 6,14. Jika dirata-ratakan maka tingkat elastisitasnya adalah elastis karena lebih besar dari 1 yaitu 1,03. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 1986 - 2001

Tahun	% Perubahan Penerimaan PAD	% Perubahan Retribusi Daerah	Elastisitas
1986	21,8	26,1	0,83
1987	19,7	22,3	0,88
1988	45,5	56,4	0,81
1989	15,8	7,7	2,05
1990	21,7	30,2	0,72
1991	31,3	33,4	0,94
1992	26,6	23,9	1,11
1993	3	-2,5	-1,20
1994	24,7	20,1	1,22
1995	33,6	5,5	6,14
1996	13,2	25,2	0,52
1997	16,5	18,2	0,91
1998	6,7	-5,2	-1,30
1999	20	36,7	0,54
2000	-12,4	-9,7	1,28
2001	66,2	62,1	1,07
	Elastisitas Rata-rata		1,03

4.1.3 Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Laba BUMD

Dari hasil perhitungan pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan laba BUMD di Kabupaten Bantul tahun 1986 - 2001, diketahui pada tahun 1986 tingkat elastisitasnya inelastis karena lebih kecil dari satu yaitu 0,50. Artinya apabila laba BUMD mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,50 dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Begitu juga pada tahun 1987, tingkat elastisitasnya inelastis sebesar 0,63. Pada tahun 1988, tingkat elastisitasnya elastis karena lebih besar dari satu yaitu sebesar 2,31. Ini berarti apabila laba BUMD mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 2,31 dengan faktor-faktor

lain dianggap tetap. Ditahun 1989 tingkat elastisitasnya juga elastis sebesar 1,48. Pada tahun 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, dan 2000, tingkat elastisitasnya kembali inelastis. Tahun 1991 dan 2001 tingkat elastisitasnya elastis. Tahun 1997 Tingkat elastisitasnya unelastis karena sama dengan satu. Artinya apabila laba BUMD mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan pad akan mengalami perubahan sebesar 1 atau dengan kata lain penerimaan PADnya tetap. Dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Jika dirata-ratakan maka tingkat elastisitasnya inelastis sebesar 0,10. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Laba BUMD
Kabupaten Bantul Tahun 1986 - 2001

Tahun	% Perubahan Penerimaan PAD	% Perubahan Laba BUMD	Elastisitas
1986	21,8	43,5	0,50
1987	19,7	31,3	0,63
1988	45,5	19,7	2,31
1989	15,8	10,7	1,48
1990	21,7	51,9	0,42
1991	31,3	28,8	1,09
1992	26,6	48,2	0,55
1993	3	11,8	0,25
1994	24,7	-03,1	-7,89
1995	33,6	87,9	0,38
1996	13,2	31	0,42
1997	16,5	16,5	1,00
1998	6,7	-16,9	-0,40
1999	20	45,4	0,44
2000	-12,4	9,7	-1,28
2001	66,2	40,8	1,62
	Elastisitas Rata-rata		0,10

4.1.4. Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Dinas- dinas.

Dari hasil perhitungan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan penerimaan dinas-dinas Kabupaten Bantul tahun 1986 - 2001, diketahui bahwa pada tahun 1986 tingkat elastisitasnya inelastis karena kurang dari 1 yaitu $-3,78$. Artinya apabila penerimaan dinas-dinas mengalami perubahan sebesar 1% dengan faktor-faktor lain dianggap tetap, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan lebih kecil dari 1% yaitu sebesar $-3,78$ dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Sedangkan pada tahun 1987, tingkat elastisitasnya elastis yaitu sebesar 2,25, berarti apabila penerimaan dinas-dinas mengalami kenaikan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 2,25 dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 1988, 1989, 1991, 1993, 1994 dan 1998, tingkat elastisitasnya kembali menjadi inelastis sebesar $-15,02$; $0,91$; $-39,28$; $-0,43$; $0,28$; dan $-1,38$. Sedangkan pada tahun 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, tingkat elastisitasnya elastis. Pada tahun 1999 sampai data terakhir tidak ada pendapatan dari penerimaa dinas-dinas, karena pendapatan dinas-dinas dimasukan atau dijadikan satu dengan pos retribusi daerah. Jika dirata-ratakan penerimaan dinas-dinas mempunyai hubungan yang inelastis terhadap penerimaan PAD karena memiliki tingkat elastisitas sebesar $-2,34$. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Dinas-
dinas Kabupaten Bantul Tahun 1986 – 2001

Tahun	% Perubahan Penerimaan PAD	% Perubahan Penerimaan Dinas - dinas	Elastisitas
1986	21,8	-58	-3,78
1987	19,7	8,8	2,25
1988	45,5	-3,0	-15,02
1989	15,8	17,2	0,91
1990	21,7	1,3	17,26
1991	31,3	-0,8	-39,28
1992	26,6	24,8	1,07
1993	3	-7	-0,43
1994	24,7	87,6	0,28
1995	33,6	12,5	2,69
1996	13,2	3,6	3,64
1997	16,5	12,2	1,36
1998	6,7	-4,9	-1,38
1999	20	-	-
2000	-12,4	-	-
2001	66,2	-	-
	Elastisitas Rata-rata		-2,34

4.1.5 Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Penerimaan lain-lain

Dari hasil perhitungan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan penerimaan lain-lain di Kabupaten Bantul tahun 1986 – 2001 diketahui bahwa pada tahun 1986 tingkat elastisitasnya inelastis karena kurang dari satu yaitu sebesar 0,96. Artinya apabila penerimaan lain-lain mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 0,96 dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Pada tahun 1987 tingkat elastisitasnya elastis yaitu sebesar 2,14. Artinya apabila penerimaan lain-lain mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan PAD akan mengalami

perubahan sebesar 2,14 dengan faktor-faktor lain dianggap tetap. Begitu juga dengan tahun 1988 tingkat elastisitasnya juga elastis sebesar 9,20. Sedangkan pada tahun 1989 sampai 2001 tingkat elastisitasnya kembali menjadi inelastis. Jika tingkat elastisitasnya dirata-ratakan, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat elastisitas penerimaan lain-lain terhadap penerimaan PAD adalah inelastis karena kurang dari 1 yaitu -0,02. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Elastisitas Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Lain-lain Kabupaten Bantul Tahun 1986 – 2001

Tahun	% Perubahan Penerimaan PAD	% Perubahan Penerimaan Lain-lain	Elastisitas
1986	21,8	22,8	0,95
1987	19,7	09,2	2,14
1988	45,5	04,9	9,20
1989	15,8	70,8	0,22
1990	21,7	-46,9	-0,46
1991	31,3	60,8	0,52
1992	26,6	56,6	0,47
1993	3	33,3	0,09
1994	24,7	-1,7	-14,59
1995	33,6	91,6	0,37
1996	13,2	-87,7	-0,15
1997	16,5	29,8	0,55
1998	6,7	68,4	0,10
1999	20	-34,9	-0,57
2000	-12,4	-40,0	0,31
2001	66,2	12,51	0,53
	Elastisitas Rata-rata		-0,02

4.2. EFEKTIFITAS

Efektifitas penenrimaan PAD dihitung dengan membandingkan antara realisasi penenrimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Adapun untuk mengukur efektifitas tersebut menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Dari tabel 4.6 data dibawah, terlihat bahwa tingkat penenrimaan PAD Kabupaten Bantul tahun 1985 – 2001 berkisar antara 81% - 152%, menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun tersebut sudah efektif. Jika dirata-ratakan secara keseluruhan nilai efektifitasnya tidak lagi mendekati 1 tapi sudah melebihi dari 1 atau 100% yaitu sebesar 1,06 atau 106% sehingga penenrimaan PAD yang dihasilkan sudah melebihi target.

Tabel 4.6
Efektifitas Penerimaan PAD Kabupaten Bantul tahun 1985 – 2001

Tahun	Realisasi penerimaan PAD	Target penerimaan PAD	Efektifitas
1985	390.575	443.301	88%
1986	485.966	585.810	83%
1987	592.213	728.319	81%
1988	941.406	870.828	108%
1989	1.102.415	1.013.337	109%
1990	1.370.136	1.280.630	107%
1991	1.878.962	1.850.720	102%
1992	2.455.964	2.200.105	112%
1993	2.530.380	2.374.678	107%
1994	3.242.832	3.283.400	99%
1995	4.553.306	3.003.753	152%
1996	5.195.012	5.025.683	103%
1997	6.130.081	5.775.609	106%
1998	6.555.905	6.115.384	107%
1999	8.011.806	6.207.409	129%

2000	7.074.418	6.560.046	108%
2001	14.073.124	13.105.527	107%
	Efektifitas Rata-rata		106%

4.3. ANALISA TREND SEDERHANA

Analisa trend sederhana digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan penerimaan PAD tahun-tahun berikutnya. Dengan catatan bahwa variabel-variabel dependen penerimaan PAD dan pengeluaran pembangunan bersifat tetap.

Tabel 4.7
Analisa Trend Sederhana Penerimaan PAD Kabupaten Bantul
Tahun 1985 – 2001

Tahun	Total PAD (Y)	X	XY	X ²
1985	390.575	-8	-3.124.600	64
1986	485.966	-7	-3.401.762	49
1987	592.213	-6	-3.553.278	36
1988	941.406	-5	-5.707.030	25
1989	1.102.415	-4	-4.409.660	16
1990	1.370.136	-3	-4.110.408	9
1991	1.878.962	-2	-3.757.924	4
1992	2.455.964	-1	-2.455.964	1
1993	2.530.380	0	0	0
1994	3.242.832	1	3.242.832	1
1995	4.553.306	2	9.106.612	4
1996	5.195.012	3	15.585.036	9
1997	6.130.081	4	24.520.324	16
1998	6.555.905	5	32.779.525	25
1999	8.011.806	6	48.070.836	36
2000	7.074.418	7	49.520.926	49
2001	14.073.124	8	112.584.992	64
	$\Sigma Y = 66.584.501$	$\Sigma X = 0$	$\Sigma XY = 264.890.457$	$\Sigma X^2 = 408$

Analisa trend sederhana menggunakan rumus : $Y' = a + bX$

Dimana Y = penerimaan PAD

a = konstanta

b = slope

n = banyak data

Perhitungan nilai a dan b yaitu :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{66.584.501}{17} = 3.916.735,353$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{264.890.457}{408} = 649.241,3162$$

Untuk menghitung perkiraan dimasa yang akan datang menggunakan rumus $Y' = a + bX$. Dimana Y' = perkiraan untuk tahun yang bersangkutan.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$Y' = 3.916.735,353 + 649.241,3162X$$

$$\text{Maka } Y' 2002 = 3.916.735,353 + 649.241,3162 (18) = \text{Rp } 15.603.079,04$$

$$Y' 2003 = 3.916.735,353 + 649.241,3162 (19) = \text{Rp } 16.252.320,36$$

$$Y' 2004 = 3.916.735,353 + 649.241,3162 (20) = \text{Rp } 16.901.561,68$$

$$Y' 2005 = 3.916.735,353 + 649.241,3162 (21) = \text{Rp } 17.550.802,99$$

Dari perhitungan analisis trend sederhana diatas, dapat diketahui bahwa perkiraan jumlah penerimaan PAD untuk 4 tahun berikutnya yaitu sebesar Rp 15.603.079,04 pada tahun 2002, Rp 16.252.320,36 tahun 2003, Rp 16.901.561,68 tahun 2004 dan Rp 17.550.802,99 tahun 2005. Sehingga dengan perkiraan-perkiraan tersebut, penerimaan PAD akan terus meningkat pada tahun-tahun

mendatang. Sedangkan analisa trend sederhana pengeluaran pembangunan untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Analisa Trend Sederhana Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Bantul
Tahun 1985 – 2001

Tahun	Pengeluaran pembangunan (Y)	X	XY	X ²
1985	2.759.356	-8	-22.074.848	64
1986	2.811.275	-7	-19.678.925	49
1987	2.509.792	-6	-15.058.752	36
1988	3.027.570	-5	-15.137.850	25
1989	3.401.228	-4	-13.604.912	16
1990	5.790.647	-3	-17.371.941	9
1991	7.946.697	-2	-15.893.394	4
1992	9.450.309	-1	-9.450.309	1
1993	10.741.881	0	0	0
1994	12.451.460	1	12.451.460	1
1995	12.451.461	2	24.902.922	4
1996	13.477.134	3	40.431.402	9
1997	18.568.231	4	74.272.924	16
1998	16.005.129	5	80.025.645	25
1999	20.487.735	6	122.926.410	36
2000	26.745.497	7	187.218.479	49
2001	30.907.833	8	247.262.664	64
	$\Sigma Y = 199.533.235$	$\Sigma X = 0$	$\Sigma XY = 661.220.975$	$\Sigma X^2 = 408$

Sumber : data diolah

Perhitungan nilai a dan b yaitu :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{199.533.235}{17} = 11.737.249,12$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{661.220.975}{408} = 1.620.639,645$$

Untuk perhitungan perkiraan dimasa yang akan datang menggunakan rumus $Y' = a + bX$, dimana Y' = perkiraan pengeluaran pembangunan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$Y' = 11.737.249,12 + 1.620.639,645X$$

$$\text{Maka } Y' 2002 = 11.737.249,12 + 1.620.639,645 (18) = \text{Rp } 40.908.762,73$$

$$Y' 2003 = 11.737.249,12 + 1.620.639,645 (19) = \text{Rp } 42.529.402,38$$

$$Y' 2004 = 11.737.249,12 + 1.620.639,645 (20) = \text{Rp } 44.150.042,02$$

$$Y' 2005 = 11.737.249,12 + 1.620.639,645 (21) = \text{Rp } 45.770.681,67$$

Dari perhitungan analisis Trend sederhana di atas, Dapat diketahui bahwa pengeluaran pembangunan kabupaten daerah tingkat II Bantul meningkat terus dari tahun ketahun.

4.4. KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Sumbangan PAD terhadap pengeluaran pembangunan kabupaten tingkat II Bantul dapat diketahui pada tabel 4.9.

Dari hasil perhitungan tabel 4.9, mak dapat dilihat besarnya sumbangan PAD terhadap pengeluaran pembangunan yang berkisar antara 14,15 % sampai dengan 45,53 % atau rata-rata sebesar 29,507 %. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD memberikan sumbangan terhadap pengeluaran pembangunan masih relatif kecil, dalam upaya menyediakan dana untuk bidang ekonomi daerah tingkat II kabupaten Bantul.

Tabel 4.9
Kontribusi Peerimaan PAD Terhadap Pengeluaran Pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 1985 – 2001

Tahun	Realisasi penerimaan PAD	Pengeluaran Pembangunan	Kontribusi (%)
1985	390.575	2.759.356	14,15
1986	485.966	2.811.275	17,29
1987	592.213	2.509.792	23,60
1988	941.406	3.027.570	31,09
1989	1.102.415	3.401.228	32,41
1990	1.370.136	5.790.647	23,66
1991	1.878.962	7.946.697	23,64
1992	2.455.964	9.450.309	25,99
1993	2.530.380	10.741.881	23,56
1994	3.242.832	12.451.460	26,04
1995	4.553.306	12.451.461	36,57
1996	5.195.012	13.477.134	38,55
1997	6.130.081	18.568.231	33,01
1998	6.555.905	16.005.129	40,96
1999	8.011.806	20.487.735	39,11
2000	7.074.418	26.745.497	26,45
2001	14.073.124	30.907.833	45,53
	Kontribusi Rata-rata		29,507

Dari perhitungan analisa trend sederhana didapat perkiraan penerimaan PAD yang terus meningkat begitu juga dengan pengeluaran pembangunan. Sehingga dengan perkiraan-perkiraan tersebut, dapat pula diketahui sumbangan yang diberikan oleh PAD terhadap pengeluaran pembangunan daerah tingkat II Bantul pada tahun 2002 sampai 2005 pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10
Kontribusi Penerimaan PAD terhadap Pengeluaran Pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 2002-2005

Tahun	Realisasi penerimaan PAD	Pengeluaran pembangunan	Kontribusi (%)
2002	15.603.079,04	40.908.762,73	38,15
2003	16.252.320,36	42.529.402,38	38,21
2004	16.901.561,68	44.150.042,02	38,28
2005	17.550.802,99	45.770.681,68	38,35
	Kontribusi rata-rata		38,26

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa sumbangan yang diberikan PAD rata-rata sebesar 38,25%. Ini berarti sumbangan yang diberikan PAD terhadap pengeluaran pembangunan terus meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan lainnya terhadap PAD yang merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran pembangunan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan kasus teori elastisitas untuk mengetahui derajat kepekaan dan tingkat pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat bahwa elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pajak daerah rata- rata adalah elastis ($E > 1$) yaitu sebesar 1,06. Sedangkan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap retribusi daerah adalah elastis ($E > 1$) selama tahun 1986 sampai 2001 sebesar 1,03. Elastisitas rata-rata pertumbuhan PAD terhadap laba BUMD adalah inelastis ($E < 1$) dengan derajat kepekaan sebesar 0,10. Elastisitas rata-rata pertumbuhan PAD terhadap penerimaan dinas – dinas adalah inelastis ($E < 1$) yaitu sebesar -2,34. Dan rata-rata pertumbuhan PAD terhadap penerimaan lain – lain adalah inelastis ($E < 1$) dengan nilai elastisitas sebesar -0,02.

2. Berdasarkan analisa efektifitas realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD selama kurun waktu 1985 sampai 2001 dapat diketahui bahwa rata- rata tingkat efektifitas penerimaan PAD per tahun cukup efektif dengan nilai sebesar 1,06 atau 106 %.
3. Berdasarkan analisa trend sederhana dari penerimaan PAD dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan PAD cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga pengeluaran pembangunan.
4. Berdasarkan kontribusi PAD terhadap pengeluaran pembangunan PAD sudah memberikan sumbangan walaupun relatif kecil yaitu sebesar 29.507% pada tahun 1985 sampai 2001. Sedangkan pada tahun 2002 sampai 2005 kontribusi PAD terhadap pengeluaran pembangunan naik menjadi 38,25%.

5.2. SARAN

1. Pemerintah lebih dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, karena pajak daerah memiliki tingkat elastisitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD.
2. Untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor penerimaan dinas-dinas, maka pemerintah daerah kabupaten Bantul agar lebih efisien dalam memungut penerimaan dinas-dinas tersebut.
3. Terbatasnya alokasi PAD untuk pengeluaran pembangunan, maka pemerintah kabupaten Bantul agar lebih memperhatikan masalah pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari A. Samudra, (1995) *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Biro pusat Statistik, (2000) *Kabupaten Bantul Dalam Angka*, Kantor Statistik Kabupaten Bantul
- B.J. Kristadi, (1985) *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah*, Prisma no. 12 Jakarta, LP3ES
- Boediono, (1982) *Ekonomi Mikro*, BPFE, UGM, Yogyakarta
- Dr. M. Suparmoko, MA, (1987) *Keuangan Negara*, BPFE, Yogyakarta
- Irianti J. Kusumawati, (2001) *Peranan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Rutin Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul Tahun 1983-1997*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional (UPN)
- Jaka Sriyana, (1999) *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah, Reformasi Perpajakan Dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UII, Vol. 4, No. 1
- Kansil, C.S.T., (1985) *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta,
- K.J. Davey, (1988) *Pembangunan Daerah*, UI Press, Jakarta
- Lincoln Arsyad, (1988) *Ekonomi Pembangunan*, BP STIE YKPN, Yogyakarta
- Nick Devas (ed), (1988) *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Yogyakarta
- RI, Undang-Undang Dasar 1945, P-4, GBHN, (1993) UI Press, Jakarta
- Sutrisno PH, (1982) *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, BPFE, UGM, Yogyakarta



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 / 2048

Membaca Surat : Dekan FE-UJI No. : 485/DEK/10/Bag.Um/V/2003
Tanggal : 23-05-2003 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tataaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada : FITROH ATMI N No. Mhs/NIM : 01422105
Name : Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Instansi :
Judul : PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI PENGELUARAN
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 1985 S.D.
2000

Lokasi : Kabupaten Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 27 Mei s/d 27 Agustus 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati /
Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya dipertukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

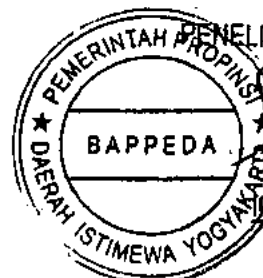
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Bupati Bantul c.q Ka. Bappeda;
4. Dekan FE-UJI Yk;
5. Peringatan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

UB KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN



NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 437 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN INSTANSI-INSTANSI LAIN YANG
MEMBANTU/BERKAITAN DENGAN USAHA PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Bantul Nomor 429 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi-Instansi Lain Yang Membantu/Berkaitan Dengan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi-Instansi Lain Yang Membantu/Berkaitan Dengan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi-Instansi Lain Yang Membantu/ Berkaitan Dengan Usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi-Instansi Lain Yang Membantu/Berkaitan Dengan Usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi-Instansi lain yang membantu/berkaitan dengan usaha pemasukan pendapatan asli daerah sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
2. pelaksanaan pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
3. rincian sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak termasuk realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, karena diatur tersendiri.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 429 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi Lain Yang Membantu/Berkaitan Dengan Memasukkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2002.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,



M. IDHAM SAMAWI

in an Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
Kepala Dipenda Kabupaten Bantul;
Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Bantul;
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;
Yang bersangkutan
Jntuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

----- sk uang perangsang/intel inside -----

1	2	4	5
	<p>2. 0,625 % dibagi :</p>	<p>14. Kasubbag Keuangan Bagian Keuangan Setda Kab. Bantul dan Kasubbag, Kasi serta Ka. UPTD Pasar Dipenda Kab. Bantul 15. Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Bantul</p> <p>Untuk dibayarkan kepada unsur lain yang membantu dan mendukung peningkatan PAD (secara tidak langsung)</p> <p>Pimpinan, Ketua Fraksi, Komisi C DPRD Kab. Bantul Camat se Kabupaten Bantul Staf lain yang mempunyai tugas berkaitan dengan pendapatan asli daerah</p>	<p>Ditunjuk dengan Keputusan Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul</p> <p>Ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dipenda Kab. Bantul</p>

BUPATI BANTUL,


M. IDHAM SAMAWI